

## **Penguatan Kepemimpinan Kepala Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Guna Mengakselerasi Pembangunan Daerah dan Sinkronisasi Astacita Presiden Prabowo Subianto**

**Verry Albert Jekson Mardame Silalahi<sup>1)\*</sup>, K.P. Suharyono S. Hadiningrat<sup>2)</sup>, Sri Sundari<sup>3)</sup>, Marisi Pakpahan<sup>4)</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Magister Manajemen, Institut Bisnis dan Multimedia asmi Jakarta

### **Abstrak**

Pembangunan daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, khususnya disparitas antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Ketimpangan infrastruktur, anggaran, sumber daya manusia, dan investasi menjadi penyebab utama kesenjangan ini. Kepemimpinan kepala daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Visi Presiden Prabowo Subianto, Astacita, yang menekankan pembangunan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas SDM, sangat relevan dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan dan tata kelola dalam mendorong pembangunan daerah serta strategi mengurangi disparitas dan menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi nasional. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, berfokus pada fenomena kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Hasil menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan, kolaborasi antar daerah, pemanfaatan teknologi digital, dan partisipasi masyarakat merupakan langkah strategis. Selain itu, sinkronisasi kebijakan daerah dengan visi Astacita diperlukan untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, kepemimpinan yang kuat, transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi kunci utama. Rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas kepemimpinan, penguatan kerja sama antar daerah, optimalisasi teknologi, serta evaluasi kinerja yang komprehensif. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih merata, inklusif, dan sejalan dengan visi nasional.

**Kata Kunci:** *astacita; good governance; kepemimpinan kepala daerah.*

Copyright (c) 2025 Verry Albert Jekson Mardame Silalahi

---

\*Corresponding author :

Email Address : [vicoletta.silalahi@gmail.com](mailto:vicoletta.silalahi@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan daerah di Indonesia merupakan salah satu agenda penting dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah masih sangat kompleks, terutama terkait dengan kesenjangan infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses terhadap layanan publik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa daerah luar Pulau Jawa masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta dan Jawa

Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa disparitas pembangunan masih menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi (BPS, 2024).

Disparitas pembangunan antara daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa telah menjadi isu yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pulau Jawa, yang hanya mencakup sekitar 6% dari total wilayah Indonesia, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi lebih dari 58% terhadap PDB nasional. Sementara itu, daerah luar Pulau Jawa, meskipun kaya akan sumber daya alam, masih menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan memiliki kontribusi hanya 42% (Rinardi et al., 2023). Angka-angka yang dikemas dalam numerik statistik tidak serta merta rakyat mempercayainya, terutama para “dinasti miskin” yang tidak memiliki akses ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Kondisinya sangat memprihatinkan, dimana menurut laporan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K bahwa 1% warganegara menguasai lebih dari 50% asset nasional; sehingga ketimpangan sangat lebar. Oleh karena itu, Negara harus hadir untuk meredefinisi dan medistribusi asset kepada rakyat melalui komunitas-komunitas yang kredibel (Raharjo, 2019).

Peran kepemimpinan kepala daerah menjadi krusial dalam mengatasi tantangan pembangunan ini. Kepala daerah yang memiliki visi yang jelas dan kemampuan manajerial yang baik dapat menjadi katalisator dalam mengakselerasi pembangunan di wilayahnya. Studi yang dilakukan oleh World Bank, (2022) menunjukkan bahwa daerah dengan kepemimpinan yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang transparan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan daerah. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Laporan dari Transparency International (2023) menyebutkan bahwa daerah dengan tingkat korupsi yang rendah dan tata kelola yang baik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Transparency International, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan langkah strategis yang tidak bisa diabaikan.

Dalam kaitan ini, peranan pemimpin nasional, daerah hingga desa/kelurahan sangat penting sebagai pelopor dan penggerak integrasi agar keutuhan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) tetap terpelihara, sekaligus guna mengakselerasi pembangunan daerah/nasional dan sinkronisasi dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto (RPJM 2025-2029).Untuk mewujudkannya diperlukan profesionalitas, kualitas dan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*), transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks nasional, visi dan misi Presiden Prabowo Subianto (Astacita) menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk mempercepat pembangunan daerah. Astacita, yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sejalan dengan kebutuhan untuk mengurangi disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk melalui program-program seperti pembangunan infrastruktur strategis dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

Disparitas pembangunan antar daerah, termasuk profesionalitas kepemimpinan kepala daerah hingga kepala desa/kelurahan memerlukan upaya *out of the box* untuk mensejajarkan sehingga gerak langkah dan dinamika dalam memimpin dan membangun daerah memiliki ritme dan kecepatan yang relatif sama. Kesamaan gerak langkah menjadi kunci sukses kepemimpinan mereka dalam membangun daerahnya masing-masing dengan tetap mengedepankan gotong royong dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Daerah yang telah maju dan memiliki kekayaan yang memadai harus didorong untuk berbagai ke daerah-daerah lain yang memerlukannya. Kolaborasi dan sinergi antara daerah akan memperkokoh dan menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional yang dikembangkan berbasis *pentha helix* melibatkan unsur pemerintah, akademisi, industri, masyarakat dan media.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama yang saling terkait. Pertama, bagaimana kepemimpinan kepala daerah dan tata kelola pemerintahan yang efektif dapat menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. Kedua, bagaimana strategi yang tepat dapat diimplementasikan untuk mengatasi disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, yang hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Ketiga, bagaimana sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan visi dan misi nasional, khususnya Astacita Presiden Prabowo Subianto, dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepemimpinan kepala daerah dan tata kelola pemerintahan dalam mendorong pembangunan daerah, serta mengidentifikasi strategi-strategi inovatif yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara yang efektif dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan visi dan misi nasional, khususnya Astacita Presiden Prabowo Subianto, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

### **Teori Kepemimpinan Trifecta**

Kepemimpinan Trifecta dikemukakan oleh Tony Gambill yang menjelaskan mengenai 3 (tiga) ketrampilan pemimpin yang dibutuhkan untuk meraih sukses, yaitu : a) *Self leadership*; b) *Technical leadership*, dan c) *Organizational leadership* (Gambill, 2025). Pentingnya penguasaan teknologi digital dan nilai-nilai Pancasila yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Indonesia ke dalam apa yang disebut dengan "*Kepemimpinan Trifecta Digital berbasis Pancasila*".



Gambar 1 : Trifecta Leadership Skills – Tony Gambill

Hasil penelitian McKinsey & Company dalam Gambill, (2025) menunjukkan bahwa bahwa 40 - 50% pemimpin baru gagal mencapai tujuannya dalam waktu 18 bulan pertama, karena dia tidak memiliki keahlian yang memadai untuk memimpin kompleksitas orang-orang dan situasi dalam organisasi. Sangat vital bagi pemimpin untuk memahami orang-orang dan konteks dengan baik. Jika pemimpin tidak memahami konteks ibaratnya navigasi tanpa peta akan salah arah, tidak relevan dan tidak efektif. Dinamika dan gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi keberhasilan seorang memimpin suatu organisasi/ perusahaan/ instansi. Tidak ada peluru perak atau satu cara yang tepat untuk menjadi pemimpin yang efektif, tetapi semua pemimpin harus memahami dan secara aktif mengembangkan tiga keahlian yang diperlukan untuk kesuksesan kepemimpinan jangka Panjang yaitu : a) Kepemimpinan Teknis; b) Kepemimpinan Organisasi; dan c) Kepemimpinan Diri. Bobot, penetrasi dan pentingnya ketiga keahlian ini ditentukan oleh konteks di mana pemimpin beroperasi di dalamnya.

Kepemimpinan tanpa memahami konteksnya seperti menavigasi tanpa peta – keputusan, perilaku, kemampuan, dan prioritas akan kekurangan arah, relevansi, atau efektivitas. Pemimpin yang memahami konteks kepemimpinan mereka memaksimalkan dampaknya, menyelaraskan tindakan mereka dengan tuntutan unik lingkungan dan pemangku kepentingan

### **Teori Kepemimpinan Digital**

Kepemimpinan Digital (Digital Leadership) adalah pendekatan kepemimpinan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan inovasi (Saputra, 2021). Kepemimpinan ini melibatkan penggunaan alat dan platform digital untuk mengelola tim, komunikasi, dan proses bisnis secara efektif.

Kepemimpinan digital memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari tipe kepemimpinan lainnya. Salah satu ciri utamanya adalah visi inovatif, di mana pemimpin digital memiliki kemampuan untuk melihat potensi teknologi dalam mencapai tujuan organisasi. Mereka tidak hanya memahami perkembangan teknologi terkini tetapi juga mampu mengarahkan organisasi untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan tersebut. Selain itu, agility atau kelincihan menjadi kunci penting dalam kepemimpinan digital, mengingat perubahan di era digital terjadi sangat cepat. Pemimpin digital harus mampu merespons dan beradaptasi dengan dinamika lingkungan bisnis dan teknologi yang terus berkembang.

Karakteristik lain yang menonjol adalah pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Pemimpin digital mengandalkan analisis data untuk menghasilkan wawasan yang mendalam, yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Selain itu, kolaborasi dan keterbukaan juga menjadi ciri khas kepemimpinan digital. Teknologi memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif, baik di dalam organisasi maupun dengan pihak eksternal, sehingga pemimpin digital harus mendorong budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif untuk memaksimalkan potensi tim. Terakhir, keamanan dan etika digital menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Pemimpin digital bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data organisasi terlindungi dengan baik dan bahwa penggunaan teknologi dilakukan secara etis, menjaga kepercayaan stakeholders dan integritas organisasi.

Kepemimpinan Trifecta Digital Berbasis Pancasila menjadi sangat urgen bagi Indonesia saat ini untuk memastikan efektivitas kepemimpinan yang maksimal dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di era digital yang serba VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity), di mana perubahan terjadi dengan cepat dan sulit diprediksi (Hadiningrat et al., 2025). Kepemimpinan Pancasila menawarkan fondasi nilai-nilai yang kuat untuk membimbing pemimpin dalam menjalankan perannya secara bertanggung jawab dan berintegritas. Nilai-nilai religius atau ketuhanan mengarahkan seorang pemimpin untuk memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia menyadari kedudukannya sebagai hamba yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan-Nya. Pemimpin harus menjadi teladan dan memberikan semangat kepada orang yang dipimpinnya untuk mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, dengan manifestasi nilai ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti diri sendiri maupun eksternal seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Nilai kekeluargaan dalam Kepemimpinan Pancasila mengarahkan pemimpin untuk mengembangkan rasa senasib dan sepenjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan Indonesia secara gotong royong. Selain itu, nilai-nilai keselarasan mendorong pemimpin untuk bersikap toleran terhadap perbedaan suku, ras, agama, dan budaya, sehingga tercipta rasa saling menghargai dan menghormati sebagai satu kesatuan bangsa. Nilai-nilai kerakyatan mengarahkan pemimpin untuk mengutamakan kepentingan rakyat, yang mewujudkan dalam bentuk nasionalisme dan patriotisme dalam mempertahankan, mengisi, dan membela negara. Terakhir, nilai-nilai keadilan menuntut pemimpin untuk bersikap adil, tidak membedakan, serta memberikan reward dan punishment sesuai dengan kontribusi dan kinerja orang yang dipimpinnya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ini, Kepemimpinan Trifecta Digital dapat menjadi solusi untuk menghadapi kompleksitas era digital sambil tetap menjaga identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

### **Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan fondasi penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel (Choirulsyah & Azhar, 2024). Transparansi adalah prinsip utama yang menuntut keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah harus menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan dan mencegah praktik korupsi. Menurut Halacmi dan Greiling (2013), transparansi adalah kunci untuk

memastikan bahwa pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat. Selain itu, akuntabilitas menjadi prinsip yang tidak kalah penting, di mana setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini mencakup tanggung jawab moral, hukum, dan finansial, serta memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas kinerja mereka. World Bank (2022), menekankan bahwa akuntabilitas adalah fondasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi prinsip kritis dalam good governance. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, mengawasi kebijakan, dan menyampaikan aspirasi mereka. Partisipasi aktif ini dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan publik. Holley (2018), menyatakan bahwa partisipasi publik adalah elemen kunci dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif. Di sisi lain, efektivitas dan efisiensi menjadi prinsip yang menuntut pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan, sementara efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara hemat tanpa pemborosan. Pranowo (2024), menegaskan bahwa efektivitas dan efisiensi adalah kunci untuk memastikan bahwa program pembangunan memberikan dampak maksimal.

Keadilan adalah prinsip lain yang tidak boleh diabaikan dalam good governance. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki akses yang sama terhadap pelayanan publik dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Keadilan menekankan pentingnya pemerataan dan penghapusan diskriminasi dalam kebijakan publik. Transparency International (2023) menyatakan bahwa keadilan adalah prinsip mendasar untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Selain itu, penegakan hukum menjadi prinsip yang menuntut semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten dan adil diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Penegakan hukum yang kuat adalah fondasi untuk mencegah korupsi dan ketidakadilan (Nikhio et al., 2023).

Responsivitas juga menjadi prinsip penting dalam good governance, di mana pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kemampuan pemerintah untuk merespons keluhan, masukan, dan tuntutan publik dengan cepat dan tepat memastikan bahwa kebijakan dan program selalu relevan dengan kondisi aktual masyarakat. Terakhir, prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan dan program pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Hariram dkk., (2023) menyatakan bahwa prinsip keberlanjutan harus diintegrasikan dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara holistik, pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang baik, yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **Pembangunan Daerah dan Disparitas Regional**

Disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, ketimpangan infrastruktur yang signifikan. Pulau Jawa memiliki infrastruktur yang jauh lebih maju, seperti jalan tol, bandara internasional, dan jaringan listrik yang andal, sementara banyak daerah luar Jawa masih kekurangan infrastruktur dasar. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa karena biaya produksi yang tinggi dan daya saing yang rendah. Kedua, alokasi anggaran pembangunan yang tidak merata. Penelitian oleh Ananda dkk., (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran nasional masih terpusat di Jawa, sementara daerah luar Jawa menerima alokasi yang lebih kecil, membatasi kemampuan mereka untuk membiayai program pembangunan.

Ketimpangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi penyebab utama. Pulau Jawa memiliki akses pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil. Di luar Jawa, kualitas pendidikan dan tingkat literasi masih rendah, menghambat kemampuan daerah tersebut untuk menarik investasi. BPS (2024), mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di luar Jawa masih jauh tertinggal. Selain itu, faktor geografis seperti kepulauan dan pegunungan di luar Jawa menyulitkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan biaya pembangunan. Kondisi geografis ini memperparah ketimpangan pembangunan.

Ketimpangan investasi swasta juga memperlebar disparitas. Pulau Jawa menarik lebih banyak investasi karena dianggap lebih stabil dan memiliki pasar yang lebih besar, sementara daerah luar Jawa dianggap berisiko tinggi. Kustodian Sentral Efek Indonesia, (2023) melaporkan bahwa lebih dari 70% investasi swasta nasional masih terpusat di Jawa. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana ketiadaan investasi menghambat pembangunan, sementara ketiadaan pembangunan membuat daerah tersebut kurang menarik bagi investor.

Dampak ekonomi dari ketimpangan ini sangat signifikan. Pertumbuhan ekonomi nasional terhambat karena potensi daerah luar Jawa yang kaya sumber daya alam tidak dapat dioptimalkan. Migrasi besar-besaran dari luar Jawa ke Jawa juga menciptakan beban sosial dan ekonomi di perkotaan Jawa, seperti kepadatan penduduk dan pengangguran. Selain itu, ketimpangan ini memperlebar kesenjangan sosial, memicu ketidakpuasan dan konflik sosial (Dahlan, 2003). Ketimpangan pembangunan tersebut dapat mengurangi rasa nasionalisme dan memperlemah kohesi sosial.

Dampak sosial lainnya adalah rendahnya kualitas hidup masyarakat di luar Jawa. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Jawa. Hal ini menciptakan ketidakadilan yang dapat memicu sentimen kedaerahan. Ketimpangan pembangunan yang tidak segera diatasi dapat menjadi ancaman serius terhadap stabilitas politik dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan ini.

## **Astacita Presiden Prabowo Subianto**

Visi dan misi Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal dengan sebutan Astacita, menekankan pada pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Visi ini bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi kerakyatan (Sudrajat, 2024).

Dalam konteks pembangunan daerah, Prabowo menekankan pentingnya pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah, khususnya antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Visi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan mengurangi disparitas regional.

Salah satu pilar utama dalam Astacita adalah penguatan ekonomi kerakyatan, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kecil dan menengah melalui program-program seperti pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, kelautan, dan industri kreatif. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada Pulau Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian Kementerian PUPR (2024), program-program berbasis ekonomi kerakyatan telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal, meskipun masih diperlukan upaya lebih besar untuk memastikan keberlanjutannya.

Relevansi Astacita dengan pembangunan berkelanjutan terlihat dari penekanannya pada pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Prabowo menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, termasuk mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi karbon. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks daerah, hal ini dapat diwujudkan melalui program-program seperti reboisasi, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan pengembangan energi terbarukan.

Astacita juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah. Prabowo berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran pembangunan ke daerah-daerah tertinggal, khususnya di luar Pulau Jawa, serta mempercepat pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Upaya ini telah mulai menunjukkan hasil, dengan peningkatan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah luar Jawa. Namun, tantangan seperti kapasitas fiskal daerah yang rendah dan keterbatasan SDM masih perlu diatasi.

Relevansi Astacita dengan pemerataan juga terlihat dari fokusnya pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal (Unesa, 2025). Prabowo menegaskan bahwa pembangunan SDM adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang inklusif. Program seperti beasiswa untuk pelajar dari daerah tertinggal dan peningkatan fasilitas kesehatan dasar diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap layanan publik. Upaya ini telah berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di beberapa daerah, meskipun masih diperlukan upaya lebih besar untuk mengejar ketertinggalan.

Secara keseluruhan, visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembangunan nasional dan daerah. Dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat, Astacita memiliki relevansi yang kuat dengan upaya Indonesia untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Namun, implementasinya memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari semua pemangku kepentingan. Keberhasilan Astacita



akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan struktural seperti ketimpangan infrastruktur, kapasitas fiskal, dan kualitas SDM.



Gambar 2: Astacita dan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan disain deskriptif kualitatif yang meneliti fenomena kepemimpinan kepala daerah dan tata kelola pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang disinkronkan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Adanya kesenjangan dan disparitas kemajuan pembangunan antar daerah dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya terutama faktor kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan menjadi problematika di dalam penelitian ini yang harus dicarikan solusi-solusi terbaik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya-upaya Penguatan Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Mengakselerasi Pembangunan Daerah dan Sinkronisasi Astacita Presiden Prabowo Subianto

Kepemimpinan kepala daerah memegang peran krusial dalam mengakselerasi pembangunan daerah dan mensinkronisasikannya dengan visi nasional, seperti Astacita Presiden Prabowo Subianto. Namun, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam di antara kepala daerah seringkali menciptakan perbedaan dalam ritme dan jalannya pemerintahan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas, dan kapasitas para kepala daerah agar lebih profesional dan mampu memimpin dengan efektif. Salah satu upaya utama adalah melalui program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan yang terstruktur. Program ini dapat mencakup pelatihan manajemen strategis, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan pengelolaan sumber daya daerah (RPJM 2025-2029). Pelatihan semacam ini telah terbukti meningkatkan kompetensi kepala daerah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang efektif.

Selain pelatihan, penting juga untuk membangun sistem mentoring dan pendampingan bagi kepala daerah, terutama bagi mereka yang baru menjabat atau

memiliki pengalaman terbatas. Mentoring dapat dilakukan oleh kepala daerah yang lebih berpengalaman atau oleh tim ahli dari pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah, seperti pengelolaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, dan penarikan investasi. Pendampingan yang intensif dapat membantu kepala daerah mengatasi keterbatasan kapasitas dan mempercepat proses pembelajaran dalam memimpin.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan kolaborasi antar daerah melalui berbagai forum kerjasama. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, berbagi best practices, atau bahkan kerjasama proyek pembangunan lintas daerah. Misalnya, daerah-daerah dengan karakteristik geografis atau ekonomi yang serupa dapat membentuk konsorsium untuk mengatasi masalah bersama, seperti pembangunan infrastruktur atau pengelolaan sumber daya alam. Forum kerjasama seperti ini tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan visi nasional, seperti Astacita Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bappenas (2023), kolaborasi antar daerah telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di beberapa wilayah.

Selain itu, pemerintah pusat dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi sinkronisasi kebijakan daerah dengan visi nasional. Salah satu caranya adalah melalui penyusunan pedoman dan standar pembangunan yang jelas, yang dapat dijadikan acuan oleh kepala daerah dalam merumuskan kebijakan lokal. Pemerintah pusat juga dapat memberikan insentif bagi daerah yang berhasil mengimplementasikan program-program yang sejalan dengan Astacita, seperti program ekonomi kerakyatan atau pembangunan berkelanjutan. Insentif fiskal dan non-fiskal dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong kepala daerah mengadopsi kebijakan yang selaras dengan visi nasional.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah juga menjadi kunci dalam memperkuat kepemimpinan kepala daerah. Dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kepala daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memenuhi kebutuhan publik dan bebas dari praktik korupsi. Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga mendorong kepala daerah untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.

Terakhir, penting untuk menciptakan mekanisme evaluasi kinerja yang komprehensif bagi kepala daerah. Evaluasi ini harus mencakup aspek-aspek seperti pencapaian target pembangunan, efektivitas kebijakan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan atau sanksi, serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi kinerja yang teratur dan objektif dapat mendorong kepala daerah untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinannya dan memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai dengan visi nasional.

### **Upaya-upaya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah guna mengakselerasi pembangunan daerah dan sinkronisasi Astacita Presiden Prabowo Subianto.**

Penguatan tata kelola pemerintahan daerah menjadi kunci penting dalam mengakselerasi pembangunan daerah dan mensinkronisasikannya dengan visi nasional, seperti Astacita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu upaya utama adalah

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem informasi yang terbuka, seperti portal data terbuka (open data) yang memuat informasi anggaran, proyek pembangunan, dan kinerja pemerintah. Menurut Transparency International (2023), transparansi tidak hanya mengurangi potensi korupsi tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi program pembangunan. Dengan tata kelola yang transparan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip Astacita, seperti keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Peningkatan kapasitas birokrasi daerah juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah, seperti dalam perencanaan strategis dan pengelolaan keuangan, dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Rahmat (2025), birokrasi yang kompeten mampu mempercepat implementasi program pembangunan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem informasi geografis (GIS) dan big data, dapat membantu pemerintah daerah dalam perencanaan dan monitoring pembangunan. Adopsi teknologi telah meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam perencanaan pembangunan di beberapa daerah.

Presiden Prabowo Subianto, melalui Asta Cita atau 8 cita-cita menekankan pada pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemandirian bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan untuk mewujudkannya harus disinkronisasikan dengan berbagai program dan para pemangku kepentingan serta dukungan dari aparatur pemerintah pusat, daerah dan desa. Dimana mereka harus memiliki kemampuan dalam merumuskan, melaksanakan, dan monitoring & evaluasi (monev) secara efektif dan terus-menerus. Berbarengan dengan komitmen bersama untuk melaksanakan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang bonus demografi maupun mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Oleh karena itu, Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepemimpinan dan Tatakelola Pemerintahan Daerah dan Desa bagi aparatur pemerintah daerah dan Desa sangat penting guna meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas SDM yang mampu profesional dan berintegritas melaksanakan pembangunan daerah dan desa maupun dalam menghadapi berbagai tantangan kemajuan zaman. Pentingnya Bimbingan Teknis (Bimtek) ini, antara lain untuk:

- a. Penguatan Kompetensi dan kapasitas SDM. Pelatihan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah. Dengan memahami prinsip-prinsip Asta Cita Prabowo Subianto, aparatur dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat sasaran.
- b. Penguatan Nilai-Nilai Juang Bangsa (NJB). Perjuangan Bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan dengan diawalinya perlawanan oleh Raja-raja Nusantara; kemudian berdirinya Boedi Oetomo 1908, Soempah Pemoeda 1928 hingga meraih Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 harus diinternalisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar mereka memiliki literasi yang benar dan utuh tentang perjuangan dan makna yang terkandung didalamnya. Bahwa nilai-nilai kejuangan, patriotisme dan nasionalisme menjadi fondasi penting bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republi Indonesia (NKRI).
- c. Adaptasi terhadap Perubahan. Dalam lingkungan yang terus berubah, pelatihan membantu aparatur untuk beradaptasi terhadap perkembangan kebijakan,

teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Ini penting agar mereka dapat bekerja secara efisien dan responsif.

- d. Penguatan Jaringan dan Kolaborasi. Pelatihan memberikan kesempatan untuk membangun jejaring dan kolaborasi antar aparatur di berbagai daerah. Hal ini penting untuk berbagi pengalaman, best practices, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Bimtek Kepemimpinan dan Tatakelola Pemerintahan Daerah dan Desa bagi aparatur pemerintah daerah dan Desa tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada efisiensi organisasi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Asta Cita Prabowo Subianto, pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di daerah. Dengan Bimtek yang tepat, aparatur akan lebih mampu melaksanakan tupoksinya dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat

Bimbingan Teknis (Bimtek) ini sangat penting dan penting karena jumlah aparatur sipil negara (ASN) sangat besar memerlukan penguatan kualitas, kapasitas dan kapabilitas mereka secara keseluruhan agar menjadi agent of change dalam pembangunan daerah/desa dan nasional.

Tabel 1. Data jumlah aparatur sipil negara (ASN) Tahun 2016 dan 2024 (belum termasuk PPPK maupun honorer)

Jabatan + Jumlah	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin (Orang)					
	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	2016	2024	2016	2024	2016	2024
Fungsional Tertentu	901.285	901.285	1.383.578	1.383.578	2.284.863	2.284.863
Fungsional Umum/Staff	1.015.197	1.015.197	640.492	640.492	1.655.689	1.655.689
Struktural	301.011	301.011	132.786	132.786	433.797	433.797
Eselon V	9.992	9.992	4.538	4.538	14.530	14.530
Eselon IV	199.886	199.886	105.901	105.901	305.787	305.787
Eselon III	72.957	72.957	19.495	19.495	92.452	92.452
Eselon II	17.592	17.592	2.724	2.724	20.316	20.316
Eselon I	584	584	128	128	712	712
Jumlah	2.217.493	2.217.493	2.156.856	2.156.856	4.374.349	4.374.349

Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjY2IzI=/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-jabatan-dan-jenis-kelamin.html>

Dengan latar belakang tersebut diatas, Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepemimpinan dan Tatakelola Pemerintahan Daerah dan Desa bagi aparatur pemerintah daerah dan Desa sangat urgen untuk diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas , kapasitas dan kapabilitas Aparatur pemerintah daerah dan, sehingga mereka lebih dapat berkontribusi secara optimal dalam berkolaborasi membangun daerah dan desa.

### **Maksud dan Tujuan Bimbingan Teknis (Bimtek)**

Bimtek Kepemimpinan dan Tatakelola Pemerintahan Daerah dan Desa bagi aparatur pemerintah daerah dan Desa dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalitas Aparatur pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bimtek Kepemimpinan dan Tatakelola Pemerintahan Daerah dan Desa bagi aparatur pemerintah daerah dan Desa bertujuan untuk:

1. Memperkuat pengembangan ketrampilan kepemimpinan dan manajerial Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa dalam hal perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan program-program pembangunan daerah dan desa.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan praktis: Bimtek ini akan memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam kepemimpinan dan tatakelola pemerintah daerah dan desa agar pembangunan daerah sukses dan memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk sinkronisasi Astacita Presiden Prabowo Subianto.
3. Mendorong Inovasi dan Kreativitas: Aparatur pemerintah perlu dilatih untuk berpikir inovatif dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
4. Membangun Jaringan dan Kolaborasi: Melalui pelatihan, peserta dapat membangun jaringan dengan aparatur lain dan pemangku kepentingan ( stakeholder), yang penting untuk kolaborasi dalam pelaksanaan program.
5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Pelatihan akan membekali peserta dengan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah.
6. Internalisasi Nilai-nilai Juang Bangsa (NJB) dan kepemimpinan Pancasila bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa.
7. Sinkronisasi program pembangunan daerah dan desa dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto.
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang lebih berkualitas, efektif, efisien, cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
9. Memaksimalkan output dan outcome kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa bagi kepentingan Lembaga maupun masyarakat.

Maksud dan tujuan dari upaya penguatan pemerintah daerah melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis (bimtek) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola potensi daerah secara optimal. Salah satu fokus utama adalah pemanfaatan sumber daya alam, di mana bimtek ini akan membekali aparatur dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan demikian, potensi alam yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Selain itu, bimtek ini juga bertujuan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan membantu aparatur merumuskan kebijakan yang sesuai dengan potensi unggulan daerah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Inovasi berbasis potensi lokal juga menjadi salah satu tujuan penting dari bimtek ini. Dengan mendorong aparatur untuk menggali dan memanfaatkan ide-ide lokal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, diharapkan dapat tercipta solusi kreatif dalam mengatasi tantangan pembangunan. Selain itu, bimtek ini

dirancang untuk memberdayakan masyarakat dengan menggerakkan partisipasi aktif mereka dalam mengelola potensi daerah. Partisipasi masyarakat tidak hanya penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lokal tetapi juga untuk membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan daerah.

Selain itu, bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dan desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya tarik daerah bagi investasi. Terakhir, bimtek ini juga diharapkan dapat memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program anggaran daerah yang terkoordinasi antar sektor dan tepat sasaran. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, program-program pembangunan dapat lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

## SIMPULAN

Pentingnya penguatan kepemimpinan kepala daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mengakselerasi pembangunan daerah dan mensinkronisasikannya dengan visi nasional, khususnya Astacita Presiden Prabowo Subianto. Disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masih menjadi tantangan besar, yang disebabkan oleh ketimpangan infrastruktur, alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan investasi. Kepemimpinan yang kuat dan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.

Visi dan misi Presiden Prabowo Subianto (Astacita) menekankan pada pembangunan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang sejalan dengan upaya mengurangi disparitas pembangunan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kapasitas aparatur, serta penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Bimbingan teknis (bimtek) bagi aparatur pemerintah daerah dan desa juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas dalam mengelola potensi daerah secara optimal.

## Referensi :

- Ananda, C. F., Artha, I. K. D. S., & Salim, W. (2023). Regional Dimensions of Infrastructure Development in Indonesia. In *Infrastructure for Inclusive Economic Development Vol. 1* (pp. 173–191). Jakarta : ERIA and Ministry of Finance.
- Bappenas. (2023). Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 2023, 01, 221.
- BPS. (2024). Indeks Pembangunan Manusia 2023. *Direktorat Analisis Dan Pengembangan Statistik BPS*, 18, 1–282.
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195–203. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>
- Dahlan, R. (2003). Penelitian Masalah Sosial Migran Di Perkotaan. *Sosio Informa*, 8(3),

- 58–68. <https://doi.org/10.33007/inf.v8i3.1008>
- Gambill, T. (2025). The Leadership Trifecta: 3 Skill Sets Leaders Need To Succeed. *LinkedIn*. <https://www.linkedin.com/pulse/leadership-trifecta-3-skill-sets-leaders-need-succeed-tony-gambill-apnbe>
- Hadiningrat, K. P. S. S., Djonisujoko, T., & Yuwono, T. (2025). *Manajemen SDM Kontemporer: Transformasi Ketenagakerjaan Indonesia Menuju Era Revolusi Industri 4.0 Perspektif Ketahanan Nasional*. Yogyakarta : Deepublish Digital.
- Halacmi, A., & Greiling, D. (2013). Transparency, E-Government, and Accountability: Some Issues and Considerations. *Public Performance & Management Review*, 36(4), 562–584. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576360404>
- Hariram, N. P., Mekha, K. B., Suganthan, V., & Sudhakar, K. (2023). Sustainalism: An Integrated Socio-Economic-Environmental Model to Address Sustainable Development and Sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 15(13). <https://doi.org/10.3390/su151310682>
- Holley, C. (2010). Public Participation, Environmental Law and New Governance: Lessons for Designing Inclusive and Representative Participatory Processes. *Environmental and Planning Law Journal*, 27(5), 360–391. <https://search.informit.org/doi/10.3316/agispt.20104551>
- Kementerian PUPR. (2024). Program PISEW 2024 Dukung Ekonomi Kerakyatan di Berbagai Daerah Indonesia. *Kompasiana Beyond Blogging*. <https://www.kompasiana.com/tiarmangulo8212/667cf17ac925c42d2a0749a2/program-pisew-2024-dukung-ekonomi-kerakyatan-di-berbagai-daerah-indonesia>
- KSEI. (2023). Investor Pasar Modal Mayoritas di Jawa, Aset Tembus Rp3.348 Triliun. *Sindo News Beyond Headlines*. <https://ekbis.sindonews.com/read/1158645/178/investor-pasar-modal-mayoritas-di-jawa-aset-tembus-rp3348-triliun-1690117621>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya (ed.)). Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Nikhio, A., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge : Jurnal UNS*, 2(6), 414–423. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79929>
- Pranowo, K. (2024). Analisis Kualitatif Dampak Kebijakan Unified Budget Terhadap PHLN Dari Tinjauan Good Governance: Studi Kasus Di Kementerian Pertanian. *Journal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 1(1), 64–74. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/JP3/article/view/3902>
- Psains Unesa. (2025). Asta Cita: Delapan Misi Menuju Indonesia Emas 2045. *Unesa Growing With Character*. <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id/post/asta-cita-delapan-misi-menuju-indonesia-emas-2045>
- Raharjo, B. (2019). Ketimpangan Melebar: 1% Warga Kuasai 50% Aset Nasional. *Republika Online*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pz4vg5415/ketimpangan-melebar-1-warga-kuasai-50-aset-nasional-part2>
- Rahmat, K. (2025). MenPAN-RB Paparkan Strategi Pencapaian Program Kerja Tahun 2025. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-7808917/menpan-rb-paparkan-strategi-pencapaian-program-kerja-tahun-2025>
- Rinardi, H., Indrahti, S., & Masruroh, N. N. (2023). Ketimpangan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa dan Perkembangan Perdagangan Antarpulau di Indonesia. *Jurnal*

- Sejarah Citra Lekha*, 8(1), 29–43. <https://doi.org/10.14710/jscl.v8i1.54443>
- RPJM 2025-2029. (2025). Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2025. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, 1–330.
- Saputra, N. (2021). *Konsep Kepemimpinan Digital : In HRM Essentials: Win your Workplace Win Your Marketplace*. Diandra Kreatif / Mirra Buana Medi.
- Sudrajat, F. I. (2024). Looking At The Future Of Indonesia In GEDSI Mainstreaming Through The Prabowo-Gibran Vision And Mission Document. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(6), 5388–5397. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i6.1497>
- Transparency International. (2024). *CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023*. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index/corruption-perceptions-index-2023/>
- World Bank. (2022). Governance and Development: Lessons from Indonesia. *World Bank Group*.